

Wawasan pengembangan kebijakan Pendidikan

Eqlimah

Program Studi Pendidikan Bahasa Arab , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: eqlimahisa86@gmail.com

Kata Kunci:

kebijakan pendidikan,
prinsip kebijakan, arah
kebijakan, sistem
pendidikan nasional, mutu
pendidikan

Keywords:

educational policy, policy
principles, policy directions,
national education system,
education quality

ABSTRAK

Kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Kebutuhan akan sistem pendidikan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan semakin mendesak seiring perkembangan globalisasi dan teknologi. Kajian ini membahas pengertian, karakteristik, prinsip, tujuan, serta arah kebijakan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan jelas, legalitas formal, bersifat operasional, dapat dievaluasi, dan disusun oleh pihak berwenang.

Prinsip nilai kemanusiaan, keadilan, serta pembangunan berkelanjutan menjadi dasar utama dalam penyusunannya. Arah kebijakan menekankan pemerataan akses, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pembaruan sistem dan kurikulum, serta penguatan lembaga pendidikan. Meski demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan, khususnya di tingkat sekolah dasar yang berperan penting bagi keberhasilan pendidikan nasional.

ABSTRACT

Educational policy plays a strategic role in shaping the quality of human resources in Indonesia. The need for an adaptive, responsive, and sustainable education system is increasingly urgent in the context of globalization and technological advancement. This study discusses the definition, characteristics, principles, objectives, and directions of educational policy as regulated in Law No. 20 of 2003 on the National Education System. The findings show that educational policy must have clear objectives, legal formality, operational aspects, be subject to evaluation, and be formulated by authorized parties. Principles of humanity, justice, and sustainable development serve as the foundation. The direction of policy emphasizes equal access, teacher quality improvement, system and curriculum reform, and institutional strengthening. However, its implementation still faces challenges, particularly at the elementary level, which is crucial to the success of national education.

Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat, kebutuhan akan sistem pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan semakin mendesak sehingga pengembangan kebijakan pendidikan menjadi aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan pendidikan dituntut mampu menjawab tantangan zaman, mencerminkan kebutuhan masyarakat, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional (Wardhana, 2020).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Wawasan pengembangan kebijakan pendidikan tidak hanya terbatas pada penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran, tetapi juga meliputi pemerataan akses, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penguatan tata kelola pendidikan. Namun demikian, kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesenjangan antarwilayah, keterbatasan anggaran, serta perubahan regulasi yang belum sepenuhnya berbasis data dan riset kebijakan. Oleh sebab itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan sangat diperlukan sebagai landasan dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Afri & Br. Sembiring, 2022).

Berdasarkan permasalahan tersebut, pembahasan dalam tulisan ini difokuskan pada tiga aspek pokok, yaitu pengertian serta karakteristik kebijakan pendidikan, prinsip-prinsip kebijakan pendidikan, dan tujuan kebijakan pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pengertian dan karakteristik kebijakan pendidikan, menguraikan prinsip-prinsip yang melandasi kebijakan pendidikan, serta menjelaskan tujuan kebijakan pendidikan dalam rangka mendukung tercapainya sistem pendidikan nasional yang berkualitas.

Pembahasan

1. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Istilah "Kebijakan Pendidikan" merupakan perpaduan dari dua konsep inti, yaitu kebijakan dan pendidikan. Kebijakan (policy) diartikan sebagai seperangkat prinsip atau pedoman yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan berbagai kegiatan secara terarah. Di sisi lain, pendidikan dipandang sebagai hak dasar setiap individu yang berperan penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan serta menciptakan perdamaian dan stabilitas dalam suatu negara (Rachman & Makkarateng, 2021).

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kebijakan pendidikan, terdapat beberapa karakteristik khusus yang perlu dipenuhi, antara lain:

1. Memiliki tujuan Pendidikan

Kebijakan pendidikan perlu memiliki sasaran yang terdefinisi dengan jelas, namun yang lebih penting adalah pengarahannya pada tujuan-tujuan pendidikan yang konkret serta berfokus pada kontribusi nyata terhadap perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan (Alimatusakdia Panggabean et al., 2024).

2. Memenuhi aspek legal-formal

Agar dapat diterapkan secara sah, kebijakan pendidikan harus memenuhi sejumlah persyaratan awal yang menjadi dasar legalitasnya di suatu wilayah. Hal ini menuntut kesesuaian kebijakan tersebut dengan ketentuan konstitusional serta sistem hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku secara lokal. Kepatuhan terhadap kerangka hukum ini menjadi kunci agar kebijakan pendidikan tersebut dapat diakui secara resmi dan memperoleh legitimasi untuk diterapkan secara efektif (Fadli, 2020).

3. Memiliki konsep operasional

Dalam kedudukannya sebagai pedoman umum, kebijakan pendidikan seyogianya

memiliki karakteristik operasional guna memastikan implementasi yang efektif di tingkat praktik. Keberadaan unsur operasional ini menjadi esensial dalam mengarahkan pencapaian tujuan pendidikan secara lebih terukur dan sistematis. Lebih lanjut, kebijakan pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang berbasis pada pertimbangan rasional dan kebutuhan empiris dalam ranah pendidikan.

4. Dibuat oleh yang berwenang

Penyusunan kebijakan pendidikan harus dilakukan oleh para ahli yang memiliki kompetensi dan otoritas di bidangnya, guna menghindari munculnya dampak negatif baik terhadap sektor pendidikan itu sendiri maupun terhadap sektor-sektor lainnya di luar pendidikan. Dalam proses perumusannya, keterlibatan elemen-elemen kunci seperti administrator pendidikan, pengelola institusi pendidikan, serta politisi yang memiliki keterkaitan langsung dengan dunia pendidikan merupakan hal yang fundamental untuk menjamin relevansi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

5. Dapat dievaluasi

Kebijakan pendidikan selalu berkaitan erat dengan situasi nyata yang harus segera ditindaklanjuti. Apabila pelaksanaannya memberikan hasil yang baik, kebijakan tersebut layak untuk dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut. Namun, jika terdapat kelemahan atau kesalahan, maka perlu dilakukan revisi agar kebijakan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan bersifat fleksibel dan dirancang agar evaluasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana namun efisien (Firdaus, 2012).

6. Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan sesungguhnya merupakan sebuah sistem yang harus dibangun berdasarkan kerangka kerja yang terorganisir secara jelas untuk mengatur semua aspek yang terkait. Kerangka kerja ini harus menjunjung tinggi prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan agar kebijakan tidak menjadi bersifat oportunistik, diskriminatif, atau mengalami kelemahan struktural akibat adanya faktor yang hilang atau bertentangan satu sama lain. Hal ini perlu mendapat perhatian serius agar penerapannya di masa depan tidak menimbulkan masalah hukum dari sisi internal. Selain itu, dari sudut pandang eksternal, kebijakan pendidikan harus terkoordinasi dengan kebijakan lain seperti kebijakan politik, kebijakan moneter, serta kebijakan pada berbagai tingkatan—baik yang lebih tinggi, sejajar, maupun yang lebih rendah—serta memperhatikan kemampuan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

2. PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Sehubungan dengan pembahasan mengenai kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan, antara lain:

Nilai-nilai pendidikan sepatutnya dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan negara di berbagai sektor. Hal ini bertujuan agar aspek kemanusiaan, keadilan sosial dan ekonomi, tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta keadilan hukum dapat mencerminkan keadilan yang berlandaskan akhlak dan martabat bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai pendidikan harus berperan aktif dalam memasuki dan memengaruhi seluruh bidang kehidupan masyarakat, terutama di tengah pesatnya perkembangan globalisasi yang memberikan dampak besar.

1. Nilai-nilai pendidikan harus menjadi jiwa yang menghidupi sistem politik serta

prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. Pendidikan berperan penting dalam memberikan masukan melalui penguasaan kompetensi dan peningkatan profesionalisme, sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan moral dalam dunia politik.

2. Nilai-nilai pendidikan harus menjadi fondasi yang menguatkan karakter dan kebudayaan bangsa, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Pendidikan berfungsi sebagai perekat yang menyatukan beragam individu dengan latar belakang budaya yang berbeda, sehingga meskipun memiliki perbedaan, mereka tetap dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai.
3. Pendidikan hendaknya menempati posisi terdepan dalam proses perubahan dan menjadi motor penggerak utama bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pasalnya, pendidikan merupakan pusat sekaligus fondasi utama dalam mendorong perkembangan dan kemajuan peradaban suatu bangsa melalui transformasi pola pikir.

3. KONSEP KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Pembahasan tentang kebijakan pendidikan biasanya mengacu pada kebijakan yang dirumuskan pemerintah dan direncanakan dapat diimplementasikan di seluruh institusi sekolah. Kebijakan sendiri meliputi aspek politik, regulasi, keputusan legislatif, norma-norma yang berlaku, kesepakatan, serta berbagai strategi perencanaan lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan ini tidak hanya mengelola mekanisme kerja internal, tetapi juga mengatur fungsi-fungsi teoritis yang berhubungan dengan berbagai sistem yang ada.

Beberapa ahli mengemukakan bahwa kebijakan merupakan tindakan dari sekelompok individu, terutama pemerintah, pada bidang khusus, atau termasuk pernyataan yang berlandaskan prinsip-prinsip khusus yang mengarah pada penyusunan program atau rencana. Dari berbagai pandangan tersebut, kebijakan pendidikan dapat diartikan sebagai keputusan yang dirumuskan pihak-pihak terkait, semisal pemerintah, pakar pendidikan, dan pelaku pendidikan lainnya. Keputusan yang telah disepakati dan dianalisis ini kemudian dijadikan dasar untuk mengembangkan program yang bertujuan mencapai target pendidikan. Kebijakan pendidikan disusun berdasarkan tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia secara menyeluruh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, penetapan kebijakan pendidikan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan dampak yang akan muncul saat kebijakan tersebut diberlakukan. Dalam merumuskan kebijakan, penting untuk memperhatikan lima komponen kebijakan pendidikan menurut Charles O. Jones agar kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Adapun komponen-komponen kebijakan tersebut terdiri dari 5 bagian, diantaranya yakni :

1. Tujuan (*goal*) adalah target yang hendak diraih oleh perorangan maupun kelompok dalam periode waktu tertentu. Penentuan tujuan adalah tahap pertama yang harus dilakukan sebelum merancang suatu kebijakan. Tujuan dalam kebijakan pendidikan

yang dirumuskan seharusnya bersifat realistis dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

2. Rencana (*plans*) adalah langkah berikutnya setelah menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Rencana merupakan suatu konsep atau rancangan yang dirancang untuk mewujudkan tujuan tersebut, sehingga pelaksanaan pengelolaan dan kebijakan pendidikan dapat berjalan secara terstruktur dan terarah.
3. Program (*programme*) merupakan rangkaian aktivitas yang dilaksanakan sebagai realisasi dari rencana yang sudah disusun guna mencapai tujuan pendidikan. Implementasi program kebijakan pendidikan diharapkan dapat menyediakan berbagai alternatif dalam proses pengambilan keputusan.
4. Keputusan (*decision*) adalah kesepakatan akhir yang dihasilkan dari program yang sudah dirancang sebelumnya. Proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap berbagai pilihan alternatif yang ada dalam tahap program. Keputusan dalam kebijakan pendidikan sebaiknya didasarkan pada alasan yang logis agar dapat diterima oleh berbagai pihak.
5. Dampak (*effects*) adalah hasil atau konsekuensi yang mungkin timbul saat kebijakan pendidikan diimplementasikan. Dengan mengamati pengaruh tersebut, kebijakan yang ada dapat dievaluasi dan dijadikan acuan untuk penyusunan kebijakan di masa mendatang.

4. ARAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Kebijakan pendidikan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dirancang untuk mencapai beberapa tujuan berikut ini:

1. Meningkatkan dan meratakan akses terhadap pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia agar tercipta sumber daya manusia yang unggul, penambahan dana pendidikan yang signifikan sebagai pendukungnya.
2. Upaya peningkatan kompetensi akademik dan profesional sekaligus perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas secara efektif, terutama dalam penguatan pendidikan karakter dan moral, sehingga kredibilitas lembaga serta tenaga kependidikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
3. Menjalankan pembaruan sistem pendidikan termasuk pembaruan kurikulum, berupa variasi kurikulum beruntuk mengakomodir keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku di tingkat nasional dan regional sesuai dengan kebutuhan daerah, serta variasi jenis pendidikan secara profesional.
4. Meningkatkan kekuatan lembaga pendidikan, baik yang berada di dalam sekolah maupun di luar sekolah, sebagai pusat penanaman nilai, sikap, dan kemampuan, serta mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai.
5. Melakukan inovasi dan penetapan sistem pendidikan nasional dengan berpedoman pada prinsip desentralisasi, kemandirian ilmiah dan manajemen.
6. Memaksimalkan mutu lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat maupun pemerintah guna memperkuat sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
7. Membangun kualitas SDM sedini mungkin dengan terencana, secara terintegrasi dan komprehensif melalui beragam upaya aktif maupun responsif dari seluruh elemen bangsa, agar generasi muda dapat tumbuh secara maksimal dengan

memperoleh hak atas dukungan serta perlindungan yang selaras dengan potensi yang dimilikinya.

8. Mendorong pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti teknologi karya anak bangsa di dunia bisnis, khususnya pada sektor bisnis kecil, menengah, dan koperasi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berperan dalam mengembangkan potensi individu, membentuk karakter, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan ditujukan agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak baik, sehat jasmani rohani, memiliki pengetahuan, mandiri, kreatif serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Meski demikian, perhatian terhadap implementasi kebijakan nasional di tingkat sekolah dasar masih belum maksimal. Padahal, sekolah dasar memiliki peran kunci sebagai jenjang awal pendidikan formal yang sangat menentukan arah pencapaian tujuan nasional.

Kesimpulan dan Saran

Kebijakan Pendidikan adalah serangkaian keputusan dan langkah strategis yang dirancang untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk manusia Indonesia yang utuh dan berdaya asing. Kebijakan ini harus memiliki tujuan jelas, legalitas formal, sifat operasional, dibuat oleh pihak berwenang, dapat dianalisis, serta memiliki rancangan yang terstruktur. Nilai-nilai pendidikan bersifat adil, bermoral, dan bebas dari intervensi politik menjadi prinsip utama yang menjiwai kebijakan tersebut, sekaligus menjadikan pendidikan sebagai penggerak perubahan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Arah kebijakan pendidikan di Indonesia menitikberatkan pada pemerataan akses pendidikan bermutu, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pembaharuan sistem dan kurikulum, serta pemberdayaan lembaga pendidikan. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 menegaskan fungsi pendidikan untuk membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat. Meski demikian, implementasi kebijakan, khususnya di tingkat sekolah dasar, masih memerlukan perhatian agar harapan pendidikan nasional bisa terwujud secara optimal.

Daftar Pustaka

- Afri, L. D., & Br. Sembiring, S. R. (2022). Pengembangan Media Pembelajaran Matematika melalui Aplikasi Kine Master pada Materi Persamaan Kuadrat. *Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(3), 3417–3430.
<https://doi.org/10.31004/cendekia.v6i3.1475>
- Alimatusakdia Panggabean, Ahmad Fachrizal, & Azizah Hanum. (2024). Arah dan Tujuan Pendidikan Islam. *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 25–35.
<https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i1.722>
- Berliana A. A. (November 2023), *Wawasan Pengembangan Kebijakan Pendidikan*,

<https://www.scribd.com/document/437002366/MAKALAH-WAWASAN-PENGEMBANGAN-KEBIJAKAN-PENDIDIKAN-doc>

Fadli, R. V. (2020). TINJAUAN FILSAFAT HUMANISME: STUDI PEMIKIRAN PAULO FREIRE DALAM PENDIDIKAN. *JURNAL REFORMA*, 9(2), 96.

<https://doi.org/10.30736/rf.v9i2.317>

Firdaus, D. (2012). “Pengaruh Kecerdasan Emosional (EQ) Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa SMA 3 Negeri Kota Palopo.” ” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang*, 19 (2), 243-55.

Mubarok F. *Perkembangan Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia*, Jurnal: Ta’lim Muta’allim, Vol.4, No.8, <https://idr.uinantasari.ac.id/6031/1/PENDIDIKAN%20ISLAM.pdf>

Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). SINERGITAS ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA. *AL-KHARAJ*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>

Rahmah A. N., Farkhan A., Alwatasi U. & Setawan F. (Oktober 2022), *Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 5

Wardhana, I. P. (2020). *KONSEP PENDIDIKAN TAMAN SISWA SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL MERDEKA BELAJAR DI INDONESIA*.

Yuliah E. (2020), *Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, Vol. 30 No. 2